

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI*, (Jakarta, 2006)
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Garner, A Bryan, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul, West, 2009)
- Hadjon, M Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, (Yogyakarta: Peradaban, 2007)
- _____, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Armico, 2003)
- Hakim, Abdul, *Dasar-dasar hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ke-4 edisi revisi, , Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti 2014)
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- _____, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Hardjoprajitno, Purbadi, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2007)
- Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta, Nusamedia, 2009)
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014)

- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Midah, Agus, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010)
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Sadi, Is Muhammad dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Salam, Faisal Moch, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Santana , Septiawan, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Simanjuntak, J. Payaman, *Masalah Hubungan Industrial Pancasila*, (Jakarta: Yayasan Tripartit Nasional, 1993)
- Sutedi, Andrian, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Sukirno, Sadono, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013)
- Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

Jurnal

Andini, , Arsyi Megarani, *Prinsip Pengawasan Hubungan Kerja Di Bidang Pengupahan Dalam Rangka Perlindungan Pekerja/Buruh* , Jurnal Hukum, Universitas jember, (2017)

Arham, Suwandi & Ahmad saleh,, *Omnibus Law Dalam Prespektif Hukum Indonesia:*, Makassar, Petitum Vol. 7 No. 2 (2019)

Azhar, Muhammad, "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan di

- Indonesia”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 Issues I, (2019)
- Busroh, Freaddy Firman, “Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017)
- Fitryantica, Agnes “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.6, Edisi III, (Desember, 2019)
- Hasri, Fastika Triani, Sonhaji, Suhartoyo, *Peran Dewan Pengupahan Kota Semarang Dalam Rangka Perlindungan (Upah) Pekerja/Buruh*: Semarang, Diponegoro Law Journal, vol 9 no. 1 (2020)
- Ismono, Joko, “Hubungan Kerja dalam Perspektif HAM, Ekonomi, dan Pembangunan ”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 2 issue 1, (2018)
- Kurniawan, Fajar, “Problematisasi Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK” : Surabaya, *Jurnal Panorama*, vol. 5 no. 1 (2020)
- Prabowo, Setyo Adhi, *Politik Hukum Omnibus Law*. *Jurnal Pamator*, Volume 13 No. 1, (April 2020)
- Purwanto, Eko Muhammad dan Efridani Lubis, *Yudicial Review Omnibus Law Dalam Melindungi Pekerja dan Mengembangkan Investasi di Indonesia*: Bekasi, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 1 , (2022)

Putra, Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17, No. 1, Maret 2020

Sonhaji, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/ PDT.SUS-PHI/ 2016 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 1 Edisi Khusus I, (2018)

Suhartoyo, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 Issue.2, (2019)

Trimaya, Arrista, *Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*: Jakarta, Aspirasi, vol 5 no. 1 (2014)

Wijaningsih, Dyah, Islamiyati Muhyidin, Ro'fah Setyowati. Access To Justice, *Nasabah Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*. Masalah-Masalah Hukum, [S.l.], v. 43, n. 3, p. 411-419, (Juli 2014)

Internet

Gatra, “Omnibus Law, Serikat Pekerja: Omnibus Law Tak Transparan”,
<https://www.gatra.com/news-469057-ekonomi-omnibus-law-serikat-pekerja-pemerintah-tak-transparan.html> , Diakses 7 April 2023

Kompas, “Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja Ini Alasan dan Isinya”,
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/01/070000765/presiden-jokowi-keluarkan-perppu-cipta-kerja-ini-alasan-dan-isinya?page=all> ,

Diakses 25 Maret 2023

Mkri, “MK: Inkonstitusional Bersyarat , UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam
Jangka Waktu Dua Tahun”,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> , Diakses 25
Maret 2023

Rahma.id, *Hak Pekerja Perempuan dalam Bayang-Bayang RUU Cipta Kerja* ,
[https://rahma.id/hak-pekerja-perempuan-dalam-bayang-bayang-ruu-cipta-
kerja/](https://rahma.id/hak-pekerja-perempuan-dalam-bayang-bayang-ruu-cipta-kerja/), Diakses 20 Maret 2023

Wahyudin, Teguh Ahmad,” Konsep Implementasi Omnibus Law Pada Sistem
Perundang-Undangan”
https://www.academia.edu/41537217/MAKALAH_OMNIBUS_LA,
Diakses pada tanggal 19 Maret 2023